

## KEMENANGAN PARTAI BURUH DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA

Simela Victor Muhamad

### Abstrak

*Kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Australia pada bulan Mei lalu membawa perubahan, atau setidaknya penyesuaian pada kebijakan luar negeri Australia. Melalui tulisan ini kemenangan Partai Buruh pimpinan Anthony Albanese dalam pemilu Australia menarik untuk dicermati dan dibahas, seperti dalam menyikapi perluasan pengaruh China di kawasan, penanganan perubahan iklim, dan hubungan Australia dengan Indonesia. Hasil kajian mengungkapkan, Australia, tidak terkecuali pemerintahan PM Albanese, menilai kebijakan China dan perannya yang asertif di kawasan Pasifik Selatan sebagai ancaman, dan oleh karena itu tidak bisa dibiarkan oleh Australia yang selama ini memiliki kedekatan hubungan yang kuat dengan negara-negara Pasifik Selatan. Untuk perubahan iklim, pemerintahan baru Australia di bawah PM Albanese akan memperkuat komitmennya dalam penanganan perubahan iklim yang selama ini disikapi secara lamban oleh pemerintahan Australia sebelumnya. Sementara itu, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan Australia dengan negara-negara tetangganya di kawasan, PM Albanese ingin mempererat hubungan negaranya dengan Indonesia.*

### Pendahuluan

Anthony Albanese menjadi Perdana Menteri (PM) Australia terpilih setelah Partai Buruh yang dipimpinnya meraup suara mayoritas dalam pemilihan nasional pada hari Sabtu, 21 Mei 2022. Hasil pemilu ini menjadi sejarah baru bagi politik Australia dalam satu dekade terakhir setelah sebelumnya pemerintahan Australia dipimpin oleh Koalisi Partai Liberal

pimpinan Scott Morrison. Morrison sudah menduduki kursi perdana menteri sejak 2018. Partai Buruh memperoleh suara mayoritas dalam pemilu Australia kali ini berkat dukungan dari Partai Hijau dan kelompok independen yang mengampanyekan kebijakan tentang kesetaraan gender dan penanganan perubahan iklim. Kampanye tersebut berhasil meraih simpati dan melenyapkan



amarah pemilih atas kelambanan pemerintahan Morrison menangani perubahan iklim (cnnindonesia.com., 21 Mei 2022).

Kemenangan Partai Buruh pimpinan Albanese diberitakan sejumlah media akan membawa perubahan bagi kebijakan luar negeri Australia, atau setidaknya penyesuaian dan penekanan pada isu-isu tertentu. Analisis memperkirakan, pemerintahan baru pimpinan PM Albanese akan fokus pada usaha diplomatik di Asia Tenggara serta menggiatkan koalisi untuk melawan kegiatan China di sana, selain juga *concern* dengan isu perubahan iklim (Kompas, 23 Mei 2022). Kemenangan Partai Buruh pimpinan Albanese dalam pemilu Australia menarik untuk dicermati dan dianalisis, terutama kebijakan luar negerinya, seperti dalam menyikapi perluasan pengaruh China, penanganan perubahan iklim, dan hubungan Australia dengan Indonesia. Hal tersebut coba dianalisis dan menjadi permasalahan yang dibahas dalam kajian singkat ini.

## Mengkhawatirkan Perluasan Pengaruh China

Pemerintahan Anthony Albanese yang berhaluan tengah-kiri menghadapi berbagai tantangan kebijakan luar negeri, termasuk dalam hubungan Australia dengan China yang disebutkan menyulitkan. Hubungan Australia-China memang merenggang selama beberapa tahun terakhir akibat berbagai pertikaian geopolitik. Langkah Beijing yang menandatangani Pakta Keamanan dengan Kepulauan Solomon, misalnya, telah meningkatkan

kekhawatiran terhadap perluasan pengaruh China yang semakin besar di kawasan Pasifik Selatan, yang selama ini dianggap Australia secara tradisional berada di bawah kekuasaan mereka. Canberra khawatir Pakta Keamanan tersebut, yang rinciannya belum diumumkan, bisa menjadi langkah menuju kehadiran militer China yang berjarak kurang dari 2.000 km dari Australia dan menjadi pijakan awal untuk kehadiran militer China di Pasifik Selatan (Kompas, 22 Mei 2022).

Kekhawatiran Australia terhadap China dapat dipahami jika menyaksikan upaya yang dilakukan China dalam beberapa tahun terakhir yang terus memperkuat pengaruhnya di seluruh dunia, tidak terkecuali di kawasan Pasifik Selatan yang secara tradisional menjadi wilayah pengaruh Australia. Perhatian China ke Pasifik Selatan tidak dapat dipungkiri memang semakin meningkat dan intensif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya bantuan ekonomi China kepada negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. China, yang tercatat sebagai pendonor peringkat ketiga setelah Australia dan AS, kerap menawarkan paket bantuan keuangan yang bertujuan untuk memperkuat perdagangan, membangun infrastruktur, meningkatkan kemampuan pemerintah dan militer, serta mengembangkan sumber daya alam. Diplomasi China tersebut disambut baik oleh para pemimpin negara-negara Pasifik Selatan, namun tidak bagi Australia (Aulia, 2022).

Australia, tidak terkecuali pemerintahan PM Albanese,

menilai perkembangan China yang luar biasa dan perannya yang lebih asertif menyebabkan negara ini dianggap sebagai ancaman keamanan di Pasifik Selatan. Kehadiran China di Pasifik Selatan bagi Australia adalah cermin dari hasrat China yang ingin menambah superioritasnya ke tingkat global. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan oleh Australia yang selama ini memiliki kedekatan hubungan yang kuat dengan negara-negara Pasifik Selatan, dan oleh karenanya kehadiran China di kawasan ini perlu disikapi secara kritis. Australia, yang selama ini juga kerap mengkritisi kebijakan keamanan China di Laut China Selatan, menilai langkah China yang asertif di Pasifik Selatan perlu direspons melalui pendekatan pertahanan dan keamanan, termasuk dengan melibatkan Amerika Serikat (AS), yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan tidak membiarkan China tampil dominan di kawasan ini.

### **Penanganan Perubahan Iklim**

Perubahan iklim juga menjadi isu yang diangkat oleh pemerintahan Partai Buruh pimpinan PM Albanese dan juga menjadi bagian yang dipromosikan dalam kebijakan luar negeri Australia. Hal tersebut tidak terlepas dari kekecewaan warga Australia yang menilai pemerintahan Australia sebelumnya di bawah PM Morrison, lamban dalam menangani krisis iklim. Kekecewaan warga Australia tersebut sudah terlihat pada saat kampanye pemilu, yang meminta para kandidat dari partai yang bertarung untuk menyiapkan kebijakan tegas terkait penanganan krisis iklim.

Secara global, Australia menyumbang 1 persen emisi karena jumlah penduduk yang relatif kecil. Akan tetapi, negara ini mengalami dampak perubahan iklim yang terasa langsung oleh warga. Kebakaran hutan hebat yang dijuluki *Black Summer* atau Musim Panas Hitam pada tahun 2019/2020 adalah kebakaran yang tercatat paling intens di Australia, dan dianggap sebagai dampak dari perubahan iklim (voaindonesia.com., 13 Mei 2022). Gelombang panas sejauh ini merupakan bahaya alam yang paling mematikan dan kondisi itu sangat mungkin terjadi di Australia. Australia merupakan negara benua berpenghuni terkering di dunia, di mana musim kemarau dapat berlangsung bertahun-tahun.

Laporan baru yang dikeluarkan Dewan Iklim, sebuah organisasi nirlaba independen, menyatakan kerugian akibat cuaca ekstrem Australia telah meningkat hampir dua kali lipat sejak tahun 1970-an. Laporan ini memperingatkan dampak finansial kebakaran, banjir, kemarau, badai dan naiknya ketinggian permukaan air laut yang terkait dengan perubahan iklim dapat melambung tinggi, berpotensi merugikan ekonomi negara hingga 76 miliar dollar AS setiap tahun pada tahun 2038 (voaindonesia.com., 13 Mei 2022). Oleh karena itu, pemerintahan baru Australia di bawah PM Albanese berkepentingan melakukan perubahan fundamental untuk menangani perubahan iklim dan merencanakan pembangunan baru. Tanpa tindakan yang lebih kuat, mustahil bagi Australia untuk

bertindak secara konsisten sejalan dengan Perjanjian Iklim Paris, suatu perjanjian internasional mengenai perubahan iklim yang mengikat secara hukum.

### **Hubungan Australia-Indonesia**

Ketua Pusat Studi Australia Universitas Nasional (CFAS), Harry Darmawan mengatakan, kemenangan Albanese dari Partai Buruh akan membawa optimisme buat Indonesia, mulai dari hubungannya dengan Australia hingga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Analisis itu, kata Harry tidak luput dipengaruhi oleh faktor sejarah, yaitu hubungan mesra kedua negara ketika Australia dipimpin Partai Buruh, yang dimulai saat Australia mendukung kemerdekaan Indonesia ([mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)., 23 Mei 2022). Faktor lainnya adalah letak geografi Indonesia yang strategis bagi Australia dan negara terbesar di kawasan. Stabilitas politik antara Indonesia dan Australia adalah jaminan bagi stabilitas Australia dan kawasan.

Ini artinya, Albanese dapat diajak berbicara untuk membahas isu keamanan yang menjadi kepentingan kedua negara, seperti halnya yang tertuang dalam Lombok Treaty. Sebagaimana diketahui, Lombok Treaty merupakan perjanjian antara Indonesia dan Australia yang menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional. Perjanjian ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mendorong dialog bilateral, pertukaran, dan pelaksanaan kegiatan secara kooperatif. Perjanjian ini

memperkuat komitmen untuk bekerja sama dalam pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, keamanan maritim, serta manajemen dan tanggap darurat.

Komitmen Partai Buruh Australia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama dengan Indonesia, dibuktikan dengan kunjungan kenegaraan PM Albanese ke Indonesia dan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Senin 6 Juni 2022 di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam kunjungan kenegaraan PM Albanese ke Indonesia, semangat untuk memastikan stabilitas dan perdamaian di kawasan muncul. Hal itu tampak dalam jumpa pers PM Albanese bersama Presiden Jokowi sesai pertemuan. Kedua pemimpin sama-sama mengutamakan stabilitas dan perdamaian kawasan (Kompas, 7 Juni 2022). Oleh karena itu, kompetisi China melawan AS bersama sekutu harus dikelola dengan baik agar tidak pecah menjadi konflik terbuka di kawasan Indo-Pasifik.

Kerja sama Australia-Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi juga menjadi perhatian Albanese (Republika, 7 Juni 2022). Dalam kunjungannya di Indonesia, Albanese menyampaikan keinginannya untuk memanfaatkan sebaik mungkin Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Australia-Indonesia (IA-CEPA). Melalui perjanjian ini, tersedia koridor atau sarana bagi relasi ekonomi yang luas. Kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua pihak merupakan salah satu wujud konkret dari relasi

dua negara. Kemajuan dan kemakmuran yang dicapai melalui kerja sama ekonomi membuat persahabatan antarnegara kian erat. Kedua pihak sama-sama merasa saling membutuhkan, sekaligus melihat harus saling memberi agar hubungan langgeng.

### Penutup

Kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Australia pada bulan Mei 2022 lalu membawa perubahan, atau setidaknya penyesuaian penekanan pada kebijakan luar negeri Australia, seperti halnya dalam menyikapi perluasan pengaruh China di kawasan Pasifik Selatan, penanganan perubahan iklim, dan hubungan Australia-Indonesia. Terkait China, Australia menilai asertifitas China di Pasifik Selatan merupakan ancaman dan cermin dari hasrat negara tersebut yang ingin menambah superioritasnya ke tingkat global. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan oleh Australia yang selama ini memiliki kedekatan hubungan yang kuat dengan negara-negara Pasifik Selatan, dan oleh karena itu kehadiran China di kawasan ini perlu disikapi secara kritis.

Untuk perubahan iklim, Partai Buruh yang menilai pemerintahan sebelumnya lamban menyikapinya, berpandangan bahwa Australia perlu melakukan perubahan fundamental untuk menangani perubahan iklim sejalan dengan dengan sasaran dalam Perjanjian Iklim Paris. Sementara itu, dalam hubungan Australia-Indonesia, pemerintahan Partai Buruh tampaknya lebih realistis dengan perkembangan

di Indonesia, dan berupaya akan memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan kedua negara. Dalam kerangka itu, kerja sama perlu diarahkan kepada pentingnya nilai dialog berkelanjutan antara kedua mitra strategis ini dalam mewujudkan Kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan sejahtera. DPR RI, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, harus ikut memastikan bahwa hubungan Indonesia dengan Australia di bawah pemerintahan Partai Buruh akan semakin baik bagi kemajuan hubungan bilateral dan juga kemajuan kawasan.

### Referensi

- “Albanese Janji Perbaiki Citra Australia”, *Media Indonesia*, 23 Mei 2022, hal. 2.
- “Albanese Prioritaskan Kawasan”, *Kompas*, 23 Mei 2022, hal. 4.
- Aulia, Luki. “China Dekati Pasifik, Australia dan Selandia Baru Kelabakan”, *kompas.id.*, 26 Mei 2022, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/05/26/china-dekati-pasifik-australia-dan-selandia-baru-kelabakan>, diakses 1 Juni 2022.
- “Australia Peringatkan Dampak Kelambanan Tindakan Terkait Perubahan Iklim”, *voaindonesia.com.*, 13 Mei 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/australia-peringatkan-dampak-kelambanan-tindakan-terkait-perubahan-iklim/5776193.html>, diakses 1 Juni 2022.
- “Australia Kritisi Perluasan Pengaruh China”, *Kompas*, 22 Mei 2022, hal. 4.
- “Indonesia-Australia Perkuat Kerja Sama”, *Republika*, 7 Juni 2022, hal. 1.

"Partai Buruh Menang, Anthony Albanese Bakal Jadi PM Australia", *cnnindonesia.com*, 21 Mei 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/799529/partai-buruh-menang-anthony-albanese-bakal-jadi-pm-australia>, diakses 30 Mei 2022.

"RI-Australia Bisa Jadi Poros Stabilitas Kawasan", *Kompas*, 7 Juni 2022, hal. 1.



Simela Victor Muhamad  
[simela.muhamad@dpr.go.id](mailto:simela.muhamad@dpr.go.id)

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di *Jurnal Politica* Vol 7 No. 1, Mei 2016); "Peran *Asian Parliamentary Assembly* dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di *Jurnal Politica*, Vol. 8 No. 1, Mei 2017); "Indonesia dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme di Kawasan" (bagian dari buku *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2018); dan "*Proxy War* dalam Konflik di Lebanon" (bagian dari buku *Proxy War* di Timur Tengah, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2019).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.